



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016**

Nama Unit	:	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Bidang keswan dan Kesmavet
Tugas Pokok	:	Melaksanakan kegiatan pengendalian Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek kesehatan masyarakat veteriner serta membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, melaksanakan dan memfasilitasi aspek kesehatan masyarakat veteriner.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis,koordinasi, pembinaan aspek kesehatan masyarakat veteriner2. Pelaksanaan pengendalian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner3. Pelaksnaaan dan fasilitas aspek kesehatan masyarakat veteriner4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya kualitas dan keamanan produk hewan	1.1 Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang mendapat sertifikat Nomor Kontrol Veterineren (NKV) (unit)	Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner adalah Bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah atas dipenuhinya persyaratan teknis Kesmavet dalam aspek higiene-sanitasi sarana dan cara berproduksi yang baik pada unit usaha produk pangan asal hewan. Ditargetkan setiap tahunnya 30 unit usaha mendapatkan Sertifikat NKV	Kabupaten/ Kota se Jawa Barat	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
		1.1.1 Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang dibina untuk audit dan surveillance NKV (unit)	Sertifikat NKV berlaku selama unit usaha tersebut masih operasional di lokasi yang sama dan dibawah management yang sama serta masih memenuhi persyaratan teknis. Penilaian terhadap kondisi higiene sanitasi ini dikategorikan dalam beberapa level yaitu : 1. Level I Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan surveilnas 1 tahun sekali 2. Level II Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan surveilnas 6 bulan sekali 3. Level III Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan surveilnas 3 bulan sekali 4. Level IV Unit usaha belum berhak mendapatkan Sertifikat NKv dan masih dalam tahap pembinaan oleh kabupaten/kota. Kegiatan audit NKV dilakukan atas permohonan dari pelaku usaha yang telah mendapatkan binaan dan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota. Kegiatan Surveilnas NKV dilakukan sesuai Hasil Penilaian NKV. Ditargetkan dalam 1 tahun kegiatan audit dan surveilans NKV dilakukan di 40 unit usaha	Kabupaten/ Kota se Jawa Barat	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
		1.2 Jumlah kabupaten/kota yang terlibat dalam kegiatan Program Monitoring dan Surveillance Residu (PMSR) dan cemaran mikroba (kabupaten/kota)	Dalam rangka memberikan jaminan keamanan terhadap produk hewan yang beredar di pasaran dilaksanakan Program Monitoring Surveilnas Residu dan Cemaran Mikroba (PMSR-CM). Kegiatan berupa pengambilan dan pengujian sampel produk hewan	Kabupaten/ Kota Se Jawa Barat	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
		1.2.1. Jumlah kabupaten/kota yang dibina untuk kegiatan PMSR dan cemaran mikroba (kabupaten/kota)	Hasil pengujian PMSR –CM merupakan bahan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan maupun dalam rangka meningkatkan kinerja petugas. Pembinaan dan pengawasan berbasis pengujian ini dilakukan diseluruh kab/kota di Jawa Barat	Kabupaten/ Kota Se Jawa Barat	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
2.	Terkendalnya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa	2.1 Jumlah kabupaten/kota yang tertib administrasi dan tertib teknis dalam melaksanakan lalu lintas produk hewan antar provinsi (kabupaten/kota)	Lalu lintas hewan dan produk hewan baik produk pangan asal hewan maupun produk hewan non pangan beresiko untuk terjadinya penularan penyakit hewan ke dalam suatu wilayah. Untuk menghindari resiko penularan akibat lalu lintas tersebut maka perlu adanya tertib adminsitras dan tertib teknis dalam melalulintaskan produk hewan	Kabupaten/ Kota Se Jawa Barat	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
		2.1.1 Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka pengawasan lalu lintas produk hewan antar provinsi (kabupaten/kota)	Untuk menghindari resiko penularan penyakit akibat lalu lintas produk hewan perlu dilakukanpembinaan kepada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kab/kota.	Kabupaten/ Kota Se Jawa Barat	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

drh. ENDANG PURWIYANTI
Pembina
NIP.19680723 199803 2 001